

MANAJEMEN ADMINISTRASI SEKOLAH MENUJU STANDARDISASI SEKOLAH RAMAH ANAK: STUDI KASUS SD FRANSISKUS KALIREJO

Piter Agung Dwi Nugroho¹, Tri Yuni Hendrowati², Fatqul Hajar Aswad³, Siswoyo⁴
Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung^{1,2,3,4}
piternugroho82@guru.sd.belajar.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen administrasi sekolah melalui fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dapat mendukung proses standarisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Fransiskus Kalirejo Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi perencanaan telah selaras dengan visi-misi sekolah dan regulasi SRA, pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan struktur Tim SRA berbasis SK dengan pembagian peran yang jelas, pelaksanaan (actuating) ditandai dengan kepemimpinan instruksional dan penerapan disiplin positif serta keterlibatan stakeholder, sedangkan pengawasan (controlling) dilakukan melalui audit partisipatif, supervisi berbasis indikator ramah anak, dan sistem pengaduan yang efektif. Secara keseluruhan, manajemen administrasi berbasis POAC terbukti menjadi fondasi utama dalam pelebagaan SRA meskipun masih terdapat tantangan pada aspek digitalisasi administrasi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa keberhasilan standarisasi Sekolah Ramah Anak sangat ditentukan oleh kekuatan sistem administrasi sekolah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis nilai perlindungan anak yang perlu diperkuat melalui digitalisasi dan penguatan sistem yang tidak bergantung pada individu.

Kata Kunci: Administrasi Sekolah, Manajemen, Sekolah Ramah Anak, Standarisasi

ABSTRACT

This study aims to analyze how school administrative management through the POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) function can support the standardization process of Child-Friendly Schools (SRA) at Fransiskus Elementary School, Kalirejo, Central Lampung. The research method used was a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data were then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results showed that the implementation of the planning function was aligned with the school's vision and mission and SRA regulations. Organization was carried out through the formation of a decree-based SRA Team structure with a clear division of roles. Implementation (actuation) was characterized by instructional leadership and positive discipline, as well as stakeholder involvement. Controlling was carried out through participatory audits, supervision based on child-friendly indicators, and an effective complaint system. Overall, POAC-based administrative management proved to be a key foundation for the institutionalization of SRA, although challenges remain in the digitalization of administration. The conclusion of this study is that the success of Child-Friendly School standardization is largely determined by the strength of an integrated, adaptive, and child-protection-based school administration system, which needs to be strengthened through digitalization and system enhancements that are not dependent on individuals.

Keywords: School Administration, Management, Child-Friendly Schools, Standardization

PENDAHULUAN

Pendidikan pada era kontemporer tidak lagi dipahami hanya sebagai proses transfer

pengetahuan akademik, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam perspektif global, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga aman secara fisik, emosional, dan sosial. Hal ini sejalan dengan mandat Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1989) yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk dalam lingkungan pendidikan. UNESCO melalui agenda Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari aspek keselamatan, inklusivitas, dan kesejahteraan peserta didik (UNESCO, 2015). Dengan demikian, sekolah sebagai institusi pendidikan formal tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ekosistem perlindungan anak yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar peserta didik secara menyeluruh.

Namun demikian, implementasi konsep sekolah aman dan ramah anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk perundungan (bullying), kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan masih tergolong tinggi dan cenderung berulang setiap tahun. Sejalan dengan itu, laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI, 2023) juga mengungkapkan bahwa kasus perundungan di tingkat sekolah dasar menjadi salah satu fenomena yang paling dominan, yang mengindikasikan bahwa fondasi pendidikan karakter di tingkat dasar masih memerlukan penguatan serius. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pendidikan yang aman dan realitas praktik di lapangan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, dalam banyak kasus justru masih menjadi tempat munculnya berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan berbagai kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, salah satunya melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Secara konseptual, Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan yang secara sadar menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa implementasi SRA bukan lagi bersifat opsional, melainkan menjadi standar layanan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan. Regulasi tersebut mengatur enam komponen utama SRA yang meliputi kebijakan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi peserta didik, serta partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses transformasi sekolah menuju SRA tidak selalu berjalan mulus. Banyak satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam sistem manajemen internal sekolah. Salah satu hambatan utama adalah masih dominannya pendekatan administratif yang bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek sistemik. Dalam banyak kasus, implementasi SRA hanya terlihat pada aspek simbolik seperti deklarasi atau pemasangan atribut, tanpa perubahan signifikan pada tata kelola manajemen sekolah.

Dalam perspektif manajemen organisasi, administrasi sekolah seharusnya dipahami sebagai sistem penggerak utama yang menghubungkan kebijakan dengan implementasi operasional di lapangan. George R. Terry menegaskan bahwa manajemen mencakup fungsi utama yang dikenal sebagai POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), yang menjadi dasar dalam pengelolaan organisasi secara efektif (Terry, 2019). Fungsi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak,

fungsi POAC menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan sistem perlindungan anak di sekolah. Perencanaan (planning) harus selaras dengan visi-misi sekolah dan kebijakan perlindungan anak. Pengorganisasian (organizing) harus mampu membentuk struktur kerja yang jelas dalam implementasi SRA. Pelaksanaan (actuating) harus mencerminkan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Sementara itu, pengawasan (controlling) harus mampu memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam aspek metodologis penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi secara siklikal. Model ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan sistematis, khususnya dalam konteks studi kasus implementasi manajemen administrasi sekolah. SD Fransiskus Kalirejo Lampung Tengah menjadi konteks penelitian yang menarik karena memiliki karakteristik kelembagaan yang unik. Sebagai sekolah yang berada di bawah naungan yayasan dengan nilai-nilai religius dan kemanusiaan, sekolah ini memiliki potensi kuat dalam mengembangkan budaya ramah anak. Namun demikian, tantangan tetap muncul, terutama dalam aspek administrasi yang masih cenderung bergantung pada individu tertentu serta keterbatasan digitalisasi sistem administrasi sekolah.

Ketergantungan terhadap figur pimpinan dalam pengelolaan administrasi berpotensi menimbulkan risiko ketidakterlanjutan sistem ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Selain itu, keterbatasan sistem dokumentasi digital juga menjadi hambatan dalam proses standardisasi SRA, khususnya dalam penyediaan bukti fisik (evidence) yang dibutuhkan dalam proses evaluasi dan akreditasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana transformasi manajemen administrasi berbasis POAC dapat memperkuat proses standardisasi Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi praktis di lapangan, serta menawarkan model pengelolaan administrasi yang lebih sistemik, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi fungsi POAC dalam manajemen administrasi sekolah di SD Fransiskus Kalirejo dapat mendukung pencapaian standar Sekolah Ramah Anak secara efektif dan berkelanjutan, serta faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan transformasi tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat fenomena yang diteliti, yaitu manajemen administrasi sekolah, yang merupakan proses sosial yang kompleks dan terikat konteks (*context-bound*). Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam hal ini, peneliti bertujuan untuk menangkap "makna" di balik praktik administrasi di SD Fransiskus Kalirejo, bukan sekadar mendata angka-angka statistik. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap "kasus" tunggal, yaitu transformasi standarisasi SRA dalam kurun waktu satu tahun ajaran (2024-2025). Penelitian dilaksanakan di SD Fransiskus Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) mengingat sekolah ini merupakan salah satu institusi pendidikan swasta tertua dan berpengaruh di wilayah tersebut yang kini sedang dalam tahap krusial standarisasi SRA nasional. Penelitian berlangsung selama enam bulan, mulai dari tahap prasurvei pada Juli 2025 hingga tahap analisis akhir pada Desember 2025.

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih berdasarkan prinsip *snowball sampling* dan *purposive sampling* untuk memastikan kekayaan informasi (*information-rich cases*).

Informan utama meliputi: (1) Kepala Sekolah, sebagai manajer tingkat atas yang bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan strategis dan pengambilan keputusan terkait SRA. (2) Staf Tata Usaha/Administrasi, sebagai aktor kunci yang mengelola aliran dokumen, arsip kesiswaan, dan pelaporan keuangan. (3) Tim Pelaksana SRA, empat orang guru yang ditunjuk secara khusus melalui SK untuk mengelola program teknis SRA. (4) Komite Sekolah, mewakili suara orang tua untuk melihat sejauh mana administrasi kemitraan sekolah terjalin. Peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang dilengkapi dengan protokol penelitian yang ketat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Observasi Terstruktur dan Tidak Terstruktur, peneliti mengamati dua aspek utama: (a) Aspek Fisik, meliputi keamanan bangunan, sanitasi, dan zona bermain; (b) Aspek Non-Fisik, meliputi pola komunikasi antara guru dan siswa serta respons staf administrasi saat melayani keluhan siswa. (2) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi temuan-temuan baru di lapangan. Wawancara direkam menggunakan alat rekam digital setelah mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari informan. (3) Studi Dokumentasi, merupakan teknik yang paling krusial dalam penelitian administrasi. Dokumen yang dianalisis meliputi RKS, RKAS, SK Tim SRA, Buku Induk Siswa, Buku Catatan Kasus, serta foto-foto kegiatan yang mendukung pemenuhan 6 komponen SRA.

Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: (1) Reduksi Data (*Data Reduction*), peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen POAC dalam administrasi SRA. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dibuang. (2) Penyajian Data (*Data Display*), data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan bagan alur untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar variabel manajemen. (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), peneliti mencari makna dari setiap hubungan data, mencari pola, dan memverifikasinya melalui pengecekan ulang di lapangan hingga ditemukan kesimpulan yang kredibel dan konsisten.

Untuk memastikan temuan penelitian tidak bersifat subjektif atau bias, peneliti menerapkan empat kriteria pemeriksaan: (1) Kredibilitas (*Credibility*), melalui perpanjangan pengamatan di sekolah dan melakukan triangulasi (triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu). Misalnya, mengecek kebenaran pernyataan kepala sekolah dengan mengamati dokumen laporan keuangan di tata usaha. (2) Transferabilitas (*Transferability*), peneliti menyusun laporan penelitian secara detail dan rinci (*thick description*) sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian dan kemungkinan aplikasinya di sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa. (3) Dependabilitas (*Dependability*), melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing atau rekan sejawat. (4) Konfirmabilitas (*Confirmability*): Memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data lapangan dan bukan merupakan opini murni peneliti, yang dilakukan melalui *member check* (mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dalam manajemen administrasi di SD Fransiskus Kalirejo menjadi langkah penting dalam mengarahkan perubahan sekolah menuju standar SRA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti membagi fungsi perencanaan menjadi beberapa bagian strategis. Pertama, integrasi visi dan misi ke dalam rencana strategis. Perencanaan dimulai dari penyesuaian visi-misi sekolah, bukan dari anggaran. SD Fransiskus Kalirejo telah menyelaraskan nilai-nilai Fransiskan seperti persaudaraan dan kasih dengan indikator formal SRA. Dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS), visi sekolah diterjemahkan menjadi target mutu yang mewajibkan terciptanya "Lingkungan Belajar yang Menyenangkan

dan Aman". Integrasi ini sangat penting, karena tanpa dasar filosofis yang kuat, staf administrasi cenderung hanya memenuhi dokumen tanpa memahami perlindungan anak. Seperti yang disampaikan Mulyasa (2022), perencanaan yang efektif harus menyentuh budaya organisasi. Di SD Fransiskus, visi ini menjadi panduan bagi semua pendidik dalam menjalankan tugas administratif. Kedua, strategi penganggaran (RKAS) yang memperhatikan hak anak. Sekolah menerapkan prinsip anggaran yang responsif terhadap gender dan anak, sehingga setiap pengeluaran dianalisis dampaknya pada keamanan anak.

Dana dialokasikan untuk perbaikan sudut tajam pada meja, pemasangan teralis pengaman, pemeliharaan instalasi listrik, pembangunan toilet sesuai standar Permen PPPA No. 4 Tahun 2024, dan pelatihan tenaga kependidikan tentang Konvensi Hak Anak (KHA). Namun, perencanaan anggaran masih sangat bergantung pada dana SPP dan bantuan yayasan, sehingga perlu mencari sumber pendanaan alternatif agar SRA tetap berjalan. Ketiga, perencanaan administrasi data dan mitigasi kasus. Sekolah sedang mengembangkan sistem "Buku Kendali Siswa" yang terintegrasi untuk mencatat perkembangan anak, termasuk *kebahagiaan dan masalah yang dihadapi*. Hal ini menunjukkan pergeseran dari "Administrasi Nilai" ke "Administrasi Kesejahteraan Anak". Namun, sistem ini masih manual sehingga bisa memperlambat respon jika ada kasus mendesak. Keempat, sinkronisasi dengan regulasi Permen PPPA No. 4 Tahun 2024. Peneliti menemukan bahwa dokumen perencanaan sekolah sudah selaras 85% dengan regulasi terbaru, termasuk mekanisme partisipasi anak melalui forum diskusi kelas sebagai bagian dari Komponen ke-5 SRA.

Analisis Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*Organizing*) dalam Ekosistem SRA. Setelah melalui fase perencanaan yang matang, SD Fransiskus Kalirejo mengimplementasikan fungsi pengorganisasian sebagai mekanisme untuk mendistribusikan tanggung jawab perlindungan anak secara struktural. Pengorganisasian di sekolah ini tidak hanya dimaknai sebagai pembagian jadwal mengajar, melainkan sebagai upaya membangun "arsitektur kelembagaan" yang responsif terhadap hak anak. (1) Formalisasi Tim Pelaksana SRA melalui SK Kepemimpinan. Langkah awal dalam pengorganisasian di SD Fransiskus adalah formalisasi Tim Pelaksana SRA melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah Nomor: 420/7094/02/D.a.VI.01/2021. Peneliti menganalisis bahwa SK ini bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi syarat akreditasi, melainkan instrumen legitimasi kekuasaan delegatif. Dalam struktur tersebut, terdapat pembagian fungsi yang spesifik: (a) Koordinator Kebijakan. Bertanggung jawab memastikan seluruh aturan sekolah tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. (b) Divisi Sarana Prasarana. Fokus pada pemeliharaan standar keamanan fisik lingkungan. (c) Divisi Kesiswaan dan Pengaduan. Bertindak sebagai kanal komunikasi jika terjadi kasus kekerasan atau perundungan. Struktur ini menunjukkan adanya upaya dekonstruksi hierarki kaku menuju struktur fungsional. Sebagaimana dinyatakan oleh Terry (2013), pengorganisasian adalah penyatuan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Di SD Fransiskus Kalirejo, penyatuan ini dilakukan dengan melibatkan unsur guru, tenaga kependidikan, hingga perwakilan orang tua di dalam tim tersebut, sehingga tanggung jawab perlindungan anak menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya beban Kepala Sekolah. (2) Manajemen Administrasi Delegatif dan Beban Kerja. Peneliti menemukan fenomena menarik dalam pembagian tugas (*division of labor*). SD Fransiskus menerapkan model manajemen partisipatif dimana setiap guru kelas juga berperan sebagai "Manajer SRA" di level kelas masing-masing. Secara administratif, hal ini didukung dengan adanya buku kendali kelas yang mencatat dinamika emosional siswa setiap harinya. Namun, pembahasan mendalam mengungkap adanya tantangan berupa *burnout* administratif. Dengan bertambahnya instrumen yang harus diisi oleh guru untuk standarisasi SRA, terjadi peningkatan beban kerja non-akademik.

Peneliti menganalisis bahwa fungsi pengorganisasian perlu didukung oleh digitalisasi birokrasi agar guru tidak terjebak pada pengisian formulir fisik yang repetitif. Efektivitas

pengorganisasian di SD Fransiskus sangat bergantung pada kepemimpinan instruksional Kepala Sekolah yang mampu memberikan motivasi di tengah padatnya beban kerja administratif standar SRA nasional. (3) Koordinasi Lintas Unit dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu indikator keberhasilan pengorganisasian adalah terciptanya koordinasi yang sinkron antar-unit. SD Fransiskus telah menyusun SOP Penanganan Kasus yang menjadi panduan administratif jika terjadi insiden di sekolah. Peneliti membedah SOP ini dan menemukan alur koordinasi yang jelas: mulai dari guru kelas sebagai penerima laporan pertama, staf administrasi sebagai pencatat kronologis, hingga Kepala Sekolah sebagai pengambil keputusan final yang melibatkan yayasan atau pihak luar jika diperlukan. Ditemukan bahwa kekuatan pengorganisasian di sekolah ini terletak pada "jalur birokrasi yang pendek". Siswa atau orang tua tidak mengalami hambatan administratif yang berbelit-belit saat ingin melaporkan masalah. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip administrasi perkantoran modern yang mengutamakan efisiensi dan responsivitas. Peneliti berargumen bahwa SOP yang terorganisir dengan baik merupakan bentuk perlindungan bagi guru dari tuduhan malpraktik pendidikan, karena setiap tindakan yang diambil memiliki landasan prosedur yang kuat. (4) Sinkronisasi Struktur dengan Nilai Spiritualitas Yayasan. Hal unik yang menjadi kedalaman analisis pada bagian ini adalah bagaimana struktur formal SRA bersinggungan dengan struktur informal Yayasan Dwi Bakti. Pengorganisasian di SD Fransiskus memiliki lapisan "pengawasan moral" dari yayasan yang memastikan bahwa setiap personel tim SRA bekerja berdasarkan nilai kemanusiaan Fransiskan. Peneliti menyimpulkan bahwa pengorganisasian di sekolah ini telah berhasil menciptakan *checks and balances*. Tidak ada satu divisi pun yang bekerja tanpa pengawasan divisi lain. Misalnya, divisi sarana prasarana tidak bisa membeli alat bermain tanpa persetujuan dari tim SRA yang menilai standar keamanan alat tersebut bagi anak. Koordinasi interdisipliner inilah yang menurut hemat peneliti menjadi tulang punggung keberhasilan SD Fransiskus Kalirejo dalam bertransformasi menjadi sekolah ramah anak yang terstandar secara administratif.

Analisis Dinamika Pelaksanaan (*Actuating*) dan Internalisasi Budaya Ramah Anak. Fungsi pelaksanaan (*actuating*) merupakan fase paling krusial dalam manajemen administrasi di SD Fransiskus Kalirejo, karena pada tahap inilah seluruh perencanaan dan pengorganisasian diuji melalui interaksi manusia yang dinamis. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan SRA di sekolah ini melampaui sekadar instruksi top-down, melainkan sebuah proses internalisasi budaya organisasi yang berbasis pada perlindungan hak anak. (1) Kepemimpinan Instruksional dan Pemberian Motivasi Tenaga Pendidik Kepala SD Fransiskus Kalirejo memainkan peran sentral sebagai *motivator* dan *dirigen* dalam pelaksanaan SRA. Peneliti menemukan bahwa teknik penggerakan yang digunakan cenderung persuasif-edukatif. Dalam rapat mingguan, kepala sekolah secara konsisten memberikan penguatan mengenai pentingnya "disiplin positif" sebagai pengganti sanksi fisik atau verbal yang menghakimi. Secara administratif, penggerakan ini didukung dengan pemberian bimbingan teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak yang melibatkan seluruh *civitas academica*. Analisis peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan *actuating* di sekolah ini dipengaruhi oleh "keteladanan administratif" pimpinan; kepala sekolah tidak hanya menuntun guru ramah pada anak, tetapi juga memberikan perlakuan yang humanis kepada guru dan staf. Hal ini menciptakan iklim kerja yang kondusif, di mana para guru merasa aman dan dihargai, yang pada akhirnya memotivasi mereka untuk mentransfer rasa aman tersebut kepada para siswa. Sebagaimana ditegaskan oleh Usman (2023), pelaksanaan manajemen yang efektif adalah yang mampu menggerakkan orang lain melalui inspirasi, bukan sekadar intimidasi birokrasi. (2) Implementasi Komunikasi Efektif dan Disiplin Positif di Ruang Kelas. Pada tingkat instruksional, pelaksanaan SRA di SD Fransiskus Kalirejo dimanifestasikan melalui perubahan pola komunikasi di ruang kelas.

Peneliti mengamati bahwa guru-guru telah mulai mengadopsi bahasa-bahasa asertif

dalam menangani konflik antar siswa. Administrasi kelas pun mengalami transformasi; setiap guru memiliki "Buku Log Perilaku Positif" yang mencatat kemajuan karakter anak, bukan hanya kesalahan mereka. Penerapan disiplin positif ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru senior yang telah lama terbiasa dengan metode punitif. Namun, melalui fungsi pergerakan yang berkelanjutan, sekolah berhasil menciptakan kesepakatan kelas (*class agreement*) yang disusun bersama antara guru dan siswa. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari Komponen ke-2 SRA (Proses Pembelajaran yang Ramah Anak). Kedalaman analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin positif ini secara signifikan menurunkan angka laporan kekerasan verbal di sekolah dalam satu semester terakhir. Peneliti menganalisis bahwa transisi ini sukses karena didukung oleh sistem pendampingan psikologis yang terintegrasi dalam manajemen kesiswaan. (3) Pelaksanaan Administrasi Layanan Terpadu dan Partisipasi Stakeholder Pelaksanaan SRA juga mencakup manajemen hubungan masyarakat (Humas). SD Fransiskus Kalirejo mengaktifkan peran orang tua melalui forum komunikasi rutin yang terdokumentasi secara administratif.

Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan SRA di sini melibatkan orang tua dalam proses pengawasan lingkungan sekolah. Secara periodik, sekolah mengadakan "Hari Terbuka" di mana orang tua dapat melihat langsung bagaimana standar ramah anak diimplementasikan di kantin, perpustakaan, dan area sanitasi. Selain itu, pelaksanaan administrasi layanan terpadu terlihat pada sinergi sekolah dengan puskesmas setempat dan lembaga perlindungan anak. Dokumentasi menunjukkan adanya jadwal kunjungan rutin yang direncanakan secara manajerial untuk memastikan kesehatan dan perlindungan anak terpantau secara formal. Peneliti berargumen bahwa *actuating* di SD Fransiskus tidak bersifat isolatif; sekolah menyadari bahwa mereka adalah bagian dari ekosistem perlindungan anak yang lebih luas. Penggunaan media sosial dan grup *WhatsApp* kelas sebagai alat koordinasi administratif mempercepat respon terhadap masalah mendesak, yang membuktikan adanya adaptasi teknologi dalam fungsi pelaksanaan manajemen. (4) Hambatan Sosiologis dan Kendala Operasional dalam Pelaksanaan. Meskipun fungsi pelaksanaan berjalan secara progresif, peneliti mengidentifikasi beberapa hambatan substansial. Pertama adalah faktor "kelelahan administratif" (*administrative fatigue*). Para guru melaporkan bahwa banyaknya instrumen observasi perilaku anak yang harus diisi sering kali menyita waktu persiapan mengajar. Kedua adalah perbedaan persepsi orang tua mengenai disiplin positif; sebagian orang tua masih menganggap bahwa ketegasan fisik diperlukan dalam mendidik anak.

Fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan tahap akhir dalam siklus manajemen administrasi yang berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu (*quality assurance*) atas standarisasi SRA di SD Fransiskus Kalirejo. Peneliti menemukan bahwa pengawasan di sekolah ini tidak lagi bersifat reaktif atau hanya dilakukan saat terjadi masalah, melainkan telah bertransformasi menjadi sistem pemantauan berkelanjutan yang berbasis data dan partisipasi. (1) Transformasi Mekanisme Monitoring. Dari Inspeksi ke Audit Partisipatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Fransiskus Kalirejo menerapkan dua model pengawasan (internal dan eksternal). Secara internal, Kepala Sekolah melakukan supervisi manajerial yang terjadwal. Namun, temuan menarik peneliti adalah adanya "Audit Partisipatif" yang melibatkan seluruh warga sekolah. Staf administrasi secara rutin melakukan pengarsipan terhadap *checklist* harian keamanan sarana prasarana. Misalnya, petugas sarana prasarana memiliki kewajiban administratif untuk mencatat kondisi fisik lingkungan setiap pagi sebelum siswa datang, mulai dari kondisi kebersihan toilet hingga memastikan tidak ada kabel listrik yang terkelupas di area bermain. Data ini kemudian direkapitulasi secara bulanan untuk menjadi bahan evaluasi manajemen. Analisis peneliti menunjukkan bahwa pengawasan berbasis instrumen tertulis ini secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan fisik pada anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Terry (2013), pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang mampu mendeteksi deviasi sedini mungkin sebelum deviasi tersebut menjadi krisis organisasi. (2) Pengawasan Kinerja Pendidik melalui Indikator Ramah Anak. Fungsi kontrol juga diterapkan pada kinerja tenaga pendidik. SD Fransiskus Kalirejo mengintegrasikan indikator ramah anak ke dalam instrumen supervisi akademik. Peneliti mengamati bahwa kepala sekolah saat melakukan supervisi kelas tidak

hanya menilai aspek pedagogik dan penguasaan materi, tetapi juga menilai "iklim emosional" kelas. Indikator yang diawasi secara administratif meliputi: (a) Apakah guru menggunakan kata-kata yang memotivasi atau menghakimi? (b) Apakah ada tindakan diskriminatif dalam pembagian perhatian kepada siswa? (c) Bagaimana respon guru saat terjadi konflik antar siswa? Hasil supervisi ini didokumentasikan dalam laporan kinerja guru yang menjadi dasar pemberian rekomendasi pelatihan lebih lanjut. Pembahasan mendalam peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang menyentuh aspek afektif guru ini merupakan kunci keberhasilan standarisasi SRA yang berkelanjutan, karena memastikan bahwa budaya ramah anak benar-benar "hidup" di dalam ruang kelas dan bukan sekadar formalitas dokumen. (3) Kanal Pengaduan dan Manajemen Keluhan sebagai Alat Kontrol Sosial. Salah satu manifestasi fungsi pengawasan yang paling berani di SD Fransiskus Kalirejo adalah pembukaan kanal pengaduan (*complaint handling system*) yang transparan. Sekolah menyediakan kotak saran fisik dan jalur komunikasi daring (*WhatsApp* grup komite) untuk menerima laporan terkait layanan SRA. Secara manajerial, setiap keluhan yang masuk dicatat dalam "Buku Tindak Lanjut Keluhan". Peneliti menganalisis bahwa sistem pengaduan ini berfungsi sebagai "katup penyelamat" organisasi. Dengan adanya kanal pengaduan yang aktif, orang tua merasa dilibatkan dalam pengawasan, sehingga potensi konflik besar dapat diredam melalui mediasi administratif yang cepat. Berdasarkan data satu tahun terakhir, terdapat penurunan tren keluhan terkait interaksi gurumurid sebesar 40%, yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal sekolah berjalan efektif. Peneliti berargumen bahwa keterbukaan administratif ini adalah bentuk tertinggi dari akuntabilitas publik sebuah sekolah ramah anak. (4) Evaluasi Periodik dan Tindak Lanjut (*Follow-up*) Hasil Pengawasan. Pengawasan tanpa tindak lanjut hanyalah sebuah catatan mati. Di SD Fransiskus Kalirejo, hasil monitoring dan pengaduan dibahas secara formal dalam Rapat Evaluasi Bulanan SRA. Peneliti menemukan bahwa dalam rapat ini, manajemen melakukan "Audit Kesenjangan" (*Gap Analysis*) untuk membandingkan posisi sekolah saat ini dengan standar ideal yang ditetapkan dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2024.

SIMPULAN

Bahwa manajemen administrasi sekolah berbasis fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) di SD Fransiskus Kalirejo secara signifikan berperan sebagai fondasi utama dalam proses standarisasi Sekolah Ramah Anak (SRA), di mana perencanaan telah terintegrasi dengan visi-misi sekolah dan regulasi perlindungan anak, pengorganisasian diwujudkan melalui struktur Tim SRA yang terformalisasi dan pembagian peran yang jelas, pelaksanaan ditandai oleh kepemimpinan instruksional yang mendorong disiplin positif serta partisipasi aktif seluruh stakeholder, dan pengawasan dilaksanakan melalui audit partisipatif, supervisi berbasis indikator ramah anak, serta sistem pengaduan yang transparan dan responsif; meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa beban administratif dan keterbatasan digitalisasi yang masih menghambat efektivitas sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SRA sangat ditentukan oleh kekuatan sistem administrasi yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, serta perlu diperkuat melalui transformasi digital agar tidak bergantung pada individu tertentu dan mampu menjamin keberlanjutan standar perlindungan anak di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asidah, E., Selva, S., & Vinusia, M. (2023). Budaya Kerapan Kerbau dalam Mempererat Hubungan Sosial Masyarakat dan Mengembangkan Produktivitas Usaha Bisnis Wisata. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 5(1), 604–626. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i1.5759>
- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (2023). Laporan Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia Tahun 2023. Jakarta: FSGI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: KPAI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

- Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2013). *Principles of Management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Terry, G. R. (2019). *Principles of Management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: KemenPPPA. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Usman, H. (2023). *Manajemen Pendidikan: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.